

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kondisi era globalisasi saat ini peningkatan suatu daerah dapat ditinjau dari peningkatan infrastruktur yang merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara maupun daerah, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang menjadi pondasi dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembangunan infrastruktur yang baik dan benar akan memudahkan roda prekonomian akan menjadi baik. Selain itu, dapat mempermudah investor untuk melakukan investasi di daerah tersebut. Kemudian pemerataan ekonomi akan tercapai ketika pembangunannya terarah dengan baik. “Pembangunan infrastruktur akan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Infrastruktur sendiri merupakan prasyarat bagi sektor-sektor lain untuk berkembang dan juga sebagai sarana penciptaan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Infrastruktur juga dapat dijadikan mobil penggerak pembangunan nasional dan menjadi konektivitas antar wilayah yang ada di Indonesia”<sup>1</sup>.

Perbaikan pada sektor infrastruktur tentunya dapat mendorong minat investasi asing dan domestik. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia beberapa tahun

---

<sup>1</sup> Michael, Todaro. *Pembangunan Ekonomi Dunia*, (Jakarta; Erlangga, 2013), hlm.62

terakhir salah satunya ditenggarai karenawilayah yang pada akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi menjadi indikator untuk melihat hasil dari pembangunan yang telah dilakukan dan dapat menentukan arah pembangunan di masa yang akan datang<sup>2</sup>.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi di suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan memberikan tambahan penghasilan di wilayah tersebut di periode tertentu. Menurut Sadono Sukirno pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di produksi dalam masyarakat bertambah. Perekonomian suatu negara dikatakan meningkat atau tumbuh ketika jumlah produksi antara barang maupun jasa mengalami peningkatan<sup>3</sup>.

Upaya mempercepat pembangunan daerah dapat dilaksanakan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitasnya. Efisiensi dalam kegiatan ekonomi harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga mendorong peningkatan potensi daerah yang berkesinambungan. Pertumbuhan potensi daerah akan mendorong proses pertukaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan memungkinkan bergeraknya perekonomian daerah sesuai dengan potensinya serta secara bersama-sama menuju proses pertumbuhan ekonomi nasional yang semakin meningkat sesuai dengan kemampuannya yang optimal.

---

<sup>2</sup> M.L.Jhing, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2012), hlm.3

<sup>3</sup> Sadono Sukirno, *Pembangunan Berkelanjutan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm.45

Infrastruktur jalan adalah salah satu aspek penting. Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya alam di suatu daerah tidak lepas dari infrastruktur yang ada di dalam daerah tersebut. Sumber daya alam ini pada hakikatnya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Infrastruktur jalan yang baik di suatu daerah akan mampu mendorong peningkatan ekonomi di daerah tersebut sebab, ketersediaan infrastruktur dapat memperluas arus perekonomian agar dapat melakukan ekspansi seluas mungkin.

Kesejahteraan ekonomi Masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga Negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari Negara. Akibatnya, masih ada warga Negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat<sup>4</sup>.

Keberhasilan dalam kegiatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sosial salah satunya disebabkan oleh pembangunan infrastruktur jalan untuk meningkatkan pendapatan penduduk desa dan memperlancar mobilitas masyarakat. Melihat kondisi ini, peneliti berusaha untuk mengungkapkan seberapa besar pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga dapat terjawab bahwa

---

<sup>4</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. (Jakarta: Erlangga 2012), hlm.10

pembangunan infrastruktur jalan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Air Hitam.

Selama lima tahun terakhir masyarakat Air Hitam juga banyak mengeluh kondisi infrastruktur khususnya infrastruktur jalan yang saat ini dirasakan sangat mengganggu arus jalan jika mereka pergi bekerja atau mengirimkan barang yang akan dijual ke pasar domestik ataupun diekspor. Kerusakan jalan menyebabkan ketidakefisienan waktu dalam berkendara dan terganggunya distribusi barang dan jasa.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis bahwa masyarakat Desa Air Hitam pada umumnya adalah petani sawit dan petani palawija, masyarakat Desa Air Hitam dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berharap pada hasil panen perkebunan dan pertanian. Namun dalam kondisi saat ini masyarakat belum mampu mensejahterakan ekonomi keluarga disebabkan karena kondisi infrastruktur jalan sepanjang 1.327 km dari seluruh jalan yang ada 75% dalam kondisi rusak parah. Akibatnya lalu lintas kurang lancar dan terhambat bagi para petani dalam upaya melakukan transaksi antara petani dengan pembeli baik yang ada di sekitar Desa Air Hitam maupun saat petani membawa hasil panen dari kebun atau ladang ke rumah sampai penjualan ke pasar.

Dampak dari rusaknya infrastruktur jalan mengakibatkan mahal biaya transportasi pengangkutan hasil panen dan rendahnya nilai jual hasil sawit dan hasil tanaman lainnya yang diterima oleh petani dari pedagang atau toke baik yang ada di desa maupun di tempat lain. Hal ini dianggap tidak sebanding antara biaya

pemanenan, biaya transportasi dengan biaya penjualan. Akibatnya kesejahteraan ekonomi masyarakat tidak dapat meningkat.

Hal ini jelas bahwa kondisi infrastruktur jalan yang rusak berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Air Hitam. Bila kondisi infrastruktur jalan tidak segera diperbaiki maka kesejahteraan ekonomi masyarakat selalu memprihatinkan bila tidak diperbaiki.

Islam mengajarkan kepada umatnya bahwa Allah SWT telah mengatur rezeki manusia, namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Surat Ar Ra'd ayat 11 :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

*Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”<sup>5</sup>.*

Sesuai dengan ayat tersebut di atas dan relevansinya dengan penelitian yang penulis lakukan bahwa masyarakat Desa Air Hitam akan dapat meningkatkan kesejahteraan ekonominya apabila aparat pemerintah setempat dapat melakukan perbaikan terutama perbaikan infrastruktur jalan sebagai akses transportasi dalam melakukan pemanenan hasil pertanian dan perkebunan masyarakat sekaligus dalam melakukan transaksi penjualan baik di desa maupun di pabrik atau tempat lainnya. Oleh karena itu jelaslah bahwa pembangunan infrastruktur cukup penting.

---

<sup>5</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : Kemenag RI, 2018), hlm. 271

Berdasarkan latar belakang dan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian tentang **Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Air Hitam**”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ppeneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh infrastruktur jalan terhadap perekonomian ummat di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara ?
2. Bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap perekonomian ummat di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh infrastruktur jalan terhadap perekonomian ummat di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh infrastruktur jalan terhadap perekonomian umat di Desa Air Hitam Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhan Batu Utara

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis
  - a. Penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan bagi mahasiswa tentang infrastruktur jalan.
  - b. Menjadi bahan literatur di perpustakaan FAI UISU Medan
  - c. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kesadaran bagima syarakat tentang pembangunan desa.
2. Secara Praktis
  - a. Bagi kepala desa hasil Penelitian ini dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan dalam hal pembangunan jalan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
  - b. Bagi masyarakat kiranya dapat memanfaatkan infrastruktur yang baik untuk meringankan beban kehidupan keluarga sehingga terjadi peningkatan ekonomi.
  - c. Peneliti selanjutnya: Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin mengkaji lebih

dalam tentang topik ini serta mengembangkannya kedalam fokus lain untuk memperkaya temuan penelitian yang lain.

### **E. Batasan Istilah**

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut :

1. Infrastruktur jalan adalah merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya *jalan raya*<sup>6</sup>

Infrastruktur jalan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jalan yang ada di Desa Air Hitam.

2. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera<sup>7</sup>

Kesejahteraan dimaksud adalah mencapai kesejahteraan manusia secara menyeluruh, yaitu kesejahteraan material, kesejahteraan spiritual dan moral. Konsep kesejahteraan ekonomi syariah bukan saja berdasarkan manifestasi nilai ekonomi, tetapi juga nilai spiritual dan moral.

3. Perekonomian adalah salah satu bidang pengkajian yang berusaha menyelesaikan masalah asas kehidupan manusia dengan cara mempersatukan segala sumber ekonomi yang ada berdasarkan teori serta prinsip ekonomi yang dinilai efektif dan efisien<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Hasan ,A, *Pembangunan Infrastruktur Desa*, (Jakarta : Nur Iman, 2018), hlm.13

<sup>7</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Depdikbud, 2016), hlm.187

<sup>8</sup> Subri Mulyadi, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*.(Jakarta:PT Grafindo, 2013), hlm.45



4. Kesejahteraan ekonomi adalah adanya peningkatan dan perbaikan kebutuhan baik spiritual maupun material di tingkat masyarakat”<sup>9</sup>.

## **F. Telaah Pustaka**

Adapun penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan adalah :

1. Aldi Parintak, 2020, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan mempunyai pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai R Square sebesar 0,320 atau 32 % dengan nilai signifikansi uji t  $0,51 > 0,05$  sehingga tidak berpengaruh signifikan.<sup>10</sup>
2. Nazar Fajri, L. 2019. Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara<sup>11</sup>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, infrastruktur jalan desa yang telah dibangun tahap demi tahap memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pada khususnya masyarakat di wilayah Desa Jenggala. Kedua, aspek-aspek yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera dan jenis pekerjaan

---

<sup>9</sup> Kemendikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Kemendikbud, 2018), hlm.324

<sup>10</sup> Aldi Parintak. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Palopo*, 2020

<sup>11</sup> Nazar Fajri, L. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara*, 2019.

serta tingkat pendidikan juga mempengaruhi laju peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

3. Sugiannor, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Fisik Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Malintut Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur , 2020<sup>12</sup>. Hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa F-Statistik adalah 60.98104. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ini lebih besar dari F tabel (0.395508). nilai Prob F-Statistik (0.00000) lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Sehingga pengujian hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak. Hal ini menjelaskan bahwa secara simultan infrastruktur fisik (X1), sumber daya alam (X2) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0.897030.
4. Dwi Indah Pratiwi, Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Sonomartani Kab. Labuhan Batu Utara, 2022<sup>13</sup>. Kesimpulan bahwa pembangunan infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang positif pada perkembangan ekonomi di Desa Sonomartani tetapi hal tersebut tidak signifikan. Uji t menghasilkan nilai 0,073 yang menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur jalan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pengembangan ekonomi,serta nilai R square sebanyak 0,046 atau 4,6%. Artinya akibat pengembangan

---

<sup>12</sup> Sugiannor, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Fisik Dalam Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Malintut Kecamatan Raren Batuah Kabupaten Barito Timur , 2020*

<sup>13</sup>Dwi Indah Pratiwi, *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat di Desa Sonomartani Kab. Labuhan Batu Utara, 2022*

infrastruktur jalan pada peningkatan ekonomi sebesar 4,6% dan 95,4% yang berasal dari pengaruh variabel lain. Hal ini pula didukung oleh hasil penelitian terdahulu serta hasil wawancara dan hasil survey.

5. HasanahDewi, (2022), pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa SisomaKecamatanAngkola Barat<sup>14</sup>. Uji t menghasilkan nilai 0,073 yang menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur jalan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada pengembangan ekonomi,serta nilai R square sebanyak 0,046 atau 4,6%. Artinya akibat pengembangan infrastruktur jalan pada peningkatan ekonomi sebesar 4,6% dan 95,4% yang berasal dari pengaruh variabel lain. Hal ini pula didukung oleh hasil penelitian terdahulu serta hasil wawancara dan hasil survey.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika pembahasan skripsi dibagi menjadi tiga bagian utama dengan rincian sebagai berikut: Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), terdiri dari:

---

<sup>14</sup>Dwi Indah Pratiwi, Pengaruh pembangunan infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Sisoma Kecamatan Angkola Barat, 2022

**Bab I PENDAHULUAN**

Terdiri dari: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan istilah, telah pustaka dan sistematika penulisan.

**Bab II LANDASAN TEORI**

Terdiri dari: pengertian infrastrukturjalan, tujuan pembangunan infrastruktur jalan, manfaat infrastruktur jalan pada masyarakat, bentuk-bentuk kesejahteraan ekonomi masyaraat, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam tinjauan syariat Islam.

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari: lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, indikator penelitian dan teknik analisis data.

**Bab IV HASIL PENELITIAN**

Terdiri dari: deskripsi hasil penelitian, pengujian hipotesis dan pembahasan

**Bab V KESIMPULAN DAN SARAN**

TerdiridariKesimpulandan Saran-Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIS

#### A. Pengertian Infrastruktur Jalan

Pengertian Infrastruktur, menurut Kodoatie, adalah fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsifungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi<sup>1</sup>. Berdasarkan pengertian infrastruktur tersebut maka infrastruktur merupakan sistem fisik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi. Secara teknik, pengertian infrastruktur dijelaskan sebagai aset fisik yang dirancang dalam sistem sehingga memberikan pelayanan publik yang penting. Oleh karena itu, infrastruktur merupakan bagian-bagian berupa sarana dan prasarana (jaringan) yang tidak terpisahkan satu sama lain yang didefinisikan dalam suatu sistem.

Pengertian Infrastruktur, menurut Susantono infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi<sup>2</sup>.

Nurmadimah, menjelaskan bahwa infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunanbangunan gedung dan

---

<sup>1</sup>Kodoatie, Robert J dan Sarief Roestam., *Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu*. (Yogyakarta: Penerbit Andi. 2012), hlm.25

<sup>2</sup> Susantono, B. Dan Mulyono, A. T., *Jalan rusak dan good governance*, (Bisnis Indonesia, Jakarta, 2018), hlm.57

fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi<sup>3</sup>. Menurut peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005, dijelaskan bahwa penyediaan infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa infrastruktur ini lebih mengarah ke infrastruktur teknis dan fisik yang mendukung jaringan struktur seperti fasilitas jalan, air bersih, perlistrikan, telekomunikasi, pengolahan limbah, bandara, waduk, tanggul, kanal, kereta api secara fungsional dapat memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat.

Infrastruktur juga diartikan sebagai fasilitas kapital fisik termasuk pula kerangka kerja organisasional, sehingga informasi dan inovasi sangat penting bagi kemajuan keuangan daerah. Dengan demikian, infrastruktur dapat dipisahkan menjadi 2 kelompok tergantung pada kapasitas dan penugasannya, yaitu dibedakan menjadi infrastruktur ekonomi dan sosial.

Sedangkan pengertian jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali

---

<sup>3</sup> Nurmadimah, F., *Analisis Pemilihan Proyek Pengembangan Bandara UPT dengan Skema KPS*. Tesis. Universitas Indonesia, 2012, hlm.2

<sup>4</sup>Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 67 tahun 2005 Tentang Infrastruktur Jalan.

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel (UU No.38 Tahun 2004). Jalan diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu: 1. Jalan umum, yaitu jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum 2. Jalan khusus, yaitu jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri<sup>5</sup>.

Berdasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang diundangkan setelah UU No 38 mendefinisikan : Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel<sup>6</sup>.

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Pada dasarnya Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.(PPRI 34/2006, pasal 4) Sesuai dengan pasal 4 tersebut terlihat bahwa penyelenggara jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, tapi saat ini peningkatan kemakmuran rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional dirasa akan terhambat karena saat ini banyak terjadi kerusakan di jalan raya dan jika ini dibiarkan

---

<sup>5</sup> UU No.38 Tahun 2004 Tentang Jalan dan Keperawatan Jalan

<sup>6</sup> UU RI No 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

berlarutlarut tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kerusakan ini akan menghambat peningkatan-peningkatan tersebut.

Jalan tol, yaitu jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol. Pada UU No. 38 Tahun 2004, jalan umum dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas jalan. Untuk pengelompokan jalan umum berdasarkan sistem dibagi dua menjadi sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Sedangkan jalan umum yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya dibagi menjadi jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Untuk jalan umum menurut statusnya dikelompokkan menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Jalan umum dikelompokkan menurut kelasnya adalah jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang dan jalan kecil<sup>6</sup>.

Pada dasarnya pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi pelbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Ini mungkin melibatkan penebasan hutan). Berbagai jenis mesin pembangun jalan akan digunakan untuk proses ini.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dipahami bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, infrastruktur jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan

---

<sup>6</sup> Ibid.



tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel<sup>7</sup>.

Dengan kata lain, pembangunan infrastruktur baru di Indonesia seperti MRT dan LRT termasuk kedalam proyek infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian nasional.<sup>8</sup>Salah satu wujud dari jenis klasifikasi ini yaitu infrastruktur transportasi yang sangat penting dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Disisi lain, biaya yang sangat besar yang dibutuhkan untuk pembangunannya seringkali menjadi perhatian besar bagi Pemerintah. Oleh sebab itu, menerapkan studi rekayasa nilai sebelum pembangunan infrastruktur dimulai akan mengatasi kekhawatiran tersebut.

Pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang, terintegrasi sistem transportasi nasional (sistranas), serta memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan. Pembangunan infrastruktur jalan harus pula memperhatikan 3 aspek penting sekaligus yaitu: aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (pro green). Menjawab tuntutan zaman, teknologi yang *pro environment* dengan *prinsip reuse, reduce & recycle* (merupakan salah satu cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah plastik dengan berbagai jenisnya) pada pekerjaan jalan perlu semakin dikembangkan. Selama pengoperasian infrastruktur jalan terus berlangsung penurunan layanan sampai dengan umur ekonomisnya. Untuk mengembalikan kondisi layanan jalan ini perlu pemeliharaan

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm.47

<sup>8</sup>Prappti, dkk, *Analisis Dampak Pembangunan. Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota*, Jurnal No.1 Vol.2, 2021.

jalan. Satu diantara jenis pemeliharaan jalan adalah peningkatan jalan. Peningkatan jalan dapat berupa peningkatan struktur perkerasan jalan dan juga pelebaran jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Pada masa pelaksanaan ini memerlukan zona kerja untuk runtu kerja pengaturan peralatan dan keselamatan pekerja.

## **B. Tujuan Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Meningkatnya pembangunan infrastruktur jalan memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi baik di wilayah desa hingga wilayah kota, infrastruktur jalan merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya yang menyebabkan perputaran ekonomi makin pesat. Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia<sup>9</sup>.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dampak pembangunan infrastruktur salah satunya adalah memperlancar arus lalu lintas, perekonomian dan informasi.

Tujuan pembangunan infrastruktur jalan diantaranya:

- a. Terwujudnya prasarana infrastruktur jalan Kabupaten dan jalan poros yang memadai melalui pembangunan
- b. Adanya peningkatan infrastruktur jalan yang aman dan nyaman.
- c. Bertambahnya panjang jalan dalam kondisi baik
- d. Terwujudnya prasarana infrastruktur jalan yang mantap, layak dan aman melalui pemeliharaan rutin dan berkala prasarana infrastruktur jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dewa Ketut, dkk, *Rancangan Penilaian Pemeriksaan Aspek Keselamatan Pada Masa Eksekusi Proyek Peningkatan Jalan Nasional*, Jurnal.Vol.2 No.1, 2015.

<sup>10</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 5 ayat (2)

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Infrastruktur jalan merupakan suatu wadah untuk menopang kegiatankegiatan dalam satu ruang.Ketersediaan infrastruktur memberikan akses mudah bagi masyarakat terhadap sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam melakukan kegiatan sosial maupun ekonomi.Dengan meningkatnya efisiensi otomatis secara tidak langsung meningkatkan perkembangan ekonomi dalam suatu wilayah.Sehingga menjadi sangat penting peran infrastruktur dalam perkembangan ekonomi.

Infrastruktur berperan sebagai penopang dalam sistem ekonomi dan sistem sosial serta menghubungkan ke lingkungan masyarakat.Ketersediaan infrastruktur dapat membantu dan mempermudah kehidupan masyarakat baik dalam segi ekonomi maupun dalam segi sosial.Dari segi ekonomi infrastruktur dapat membantu penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang belum atau sedang mencari pekerjaan, serta dapat menarik investor untuk melakukan investasi.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya di perkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil.Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja.Selain itu, infrastruktur

merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya<sup>11</sup>.

Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya masih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar pasar, dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralsir harga harga barang dan jasa antar daerah (antar kota dan kampungkampung). Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dapat meningkatkan daya tarik investasi. Peningkatan investasi akan meningkatkan pembangunan yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja saat dan setelah pembangunan.

### **C. Manfaat Infrastruktur Jalan pada Masyarakat**

Infrastruktur berperan sangat penting yaitu sebagai salah satu roda penggerak untuk pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan. Kehadiran infrastruktur yang memadai memang sangat diperlukan. Sarana serta prasarana dalam bentuk fisik atau seringkali disebut dengan infrastruktur adalah bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Sedikitnya ada sejumlah manfaat infrastruktur diantaranya:

1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah atau antar negara;
2. Meningkatkan produktivitas suatu wilayah atau negara;
3. Meningkatkan efisiensi dalam alokasi sumber daya;
4. Mempercepat pemerataan pembangunan suatu wilayah atau negara;

---

<sup>11</sup> Adisasmita, A. S. *Perencanaan Infrastruktur Transportasi Wilayah*. (Graha Ilmu, Jakarta, 2012), hlm.82

5. Mendorong investasi baru yang masuk ke wilayah atau negara tersebut<sup>12</sup>.

Fasilitas fisik adalah hal yang sangat vital untuk mendukung berbagai macam kegiatan perekonomian, pemerintahan, industri, dan juga kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Mulai dari transportasi jalan raya, sistem energi, bangunan sekolah dan perkantoran, sampai jaringan telekomunikasi, jaringan layanan air bersih, rumah ibadah, dan lainnya. Semua itu membutuhkan adanya dukungan infrastruktur yang memadai.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah /Kabupaten Tahun 2011 sampai 2016, infrastruktur daerah menjadi sebuah isu strategis yang diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan di daerah-daerah. Kebijakan pembangunan jangka panjang tersebut merupakan sebuah upaya perbaikan yang berkesinambungan terhadap:

1. Penanganan kemiskinan
2. Pengolahan sumber daya alam
3. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan juga kesehatan
4. Kemudahan akses masyarakat terhadap fasilitas serta pelayanan publik
5. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar
6. Kemudahan akses masyarakat terhadap air bersih
7. Penanganan daerah rawan bencana<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Pasal 5 ayat (2)

Lebih lanjut, dapat diterlusuri lebih jauh beberapa manfaat dari pembangunan pengangkutan atau transportasi berupa jalan, mencakup manfaat sosial di dalamnya:

1. Mereduksi biaya eksploitasi sumber daya
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi
3. Memangkas waktu perjalanan angkutan barang dan penumpang sehingga
4. Meminimalkan potensi kecelekaan dan kerusakan
5. Kenyamanan dan perasaan aman yang meningkat dari masyarakat<sup>14</sup>

Dampak tidak langsung lainnya dari adanya pembangunan jalan adalah meningkatnya produktivitas masyarakat di lokasi awal dan akhir karena waktu tempuh yang berkurang serta meningkatnya potensi investasi di daerah yang terkoneksi. Selain itu lapangan kerja yang muncul ketika pembangunan jalan dan kesempatan untuk memperkukuh kesatuan nasional juga menjadi salah satu manfaat yang timbul. Namun, perlu diperhatikan beberapa hal yang timbul disamping manfaat yang ada misalnya terdapat kerusakan lingkungan dan isu sosial lain.

#### **D. Pengertian Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “Sejahtera” berarti “aman, sentosa dan makmur; selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya.”<sup>15</sup> Dengan demikian kesejahteraan adalah keadaan masyarakat yang sejahtera, yakni masyarakat yang aman, terpenuhi segala

---

<sup>13</sup>Andriyani, N. *Pengaruh Pembangunan Infrastruktur (Perbaikan Jalan) Jalan Raya Pasar Pringsewu terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar dalam ekonomi Islam*. Skripsi. 2018

<sup>14</sup> Atmaja, H. K., & Mahalli, K. *Pengaruh peningkatan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di kota Sibolga*. Jurnal Ekonomi, Vol.1 No.2, 2018.

<sup>15</sup> Waryono Abdul Ghafur, dkk, *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial: Teori, Pendekatan dan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru, 2012), hlm. 6.

kebutuhannya dan jauh dari berbagai problem. Sedangkan kesejahteraan menurut Undang – Undang No 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan. Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya<sup>16</sup>.

Kesejahteraan menurut pandangan masyarakat modern yaitu suatu kondisi dimana kebutuhan pokok seseorang dapat terpenuhi, baik itu kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang layak yang dapat mengangkat derajat kualitas hidupnya sehingga bisa mempunyai status sosial terhadap warga lainnya.

Kemudian, menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), kesejahteraan didefinisikan bahwa setiap laki laki maupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.2 Garda maeswara menjelaskan kesejahteraan merupakan rasa nyaman masyarakat karena terpenuhinya keinginan lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kesejahteraan ekonomi sosial seperti kesejahteraan sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kesejahteraan batin, itu yang bersifat emosional, intelektual, dan spiritual masyarakat<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Undang – Undang No 11 tahun 2009 pasal 1 dan 2 tentang kesejahteraan

<sup>17</sup> Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2015) hlm. 24.

Kesejahteraan menurut Hatta, adalah peran hidup seseorang yang sederajat lebih tinggi dari kebahagiaan. Seseorang merasa hidupnya sejahtera apabila merasa bahagia, merasa tercukupi terhadap apa yang mungkin sudah dicapai dalam batasan hidupnya. Ia merasa jiwanya tenram baik itu lahir maupun batin dan merasa adanya keadilan dalam hidupnya, terlepas dari bahaya kemiskinan yang mengancam dan menyiksa.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengertian kesejahteraan diatas dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan adalah suatu kondisi seseorang yang dipertanggung jawabkan atas kebutuhannya melalui semangat kerja yang baik. Sehingga, segala kebutuhannya dapat terpenuhi baik itu kebutuhan material maupun non material, yang dapat dilihat dari pendapatan yang diterima, kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan menyeluruh, dan pendidikan yang mudah dijangkau.

Kesejahteraan ekonomi adalah salah satu cabang ilmu ekonomi yang normatif yang berkaitan dengan pertanyaan apa yang buruk dan apa yang baik di dalam perekonomian.<sup>19</sup> Ilmu ekonomi dapat dikatakan bagian dari ilmu sosial yang meninjau perilaku manusia dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan. Seperti kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu banyak beraneka ragam. Satu kebutuhan terpenuhi akan muncul kebutuhan lain. Kebutuhan ini akan semakin bertambah dan akan terus berkembang baik jumlah maupun kualitasnya seiring dengan kemajuan peradaban manusia.

---

<sup>18</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 161.

<sup>19</sup> Allan M. Feldman, *Ekonomi Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), hlm. 1.



Ekonomi merupakan suatu kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas hidup manusia. Hal ini dapat dijelaskan bahwa kualitas hidup manusia dipengaruhi oleh keadaan dan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Tingkah laku masyarakat ditujukan terhadap faktor dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Seperti, keinginan dan kebutuhan konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh hukum ekonomi<sup>20</sup>.

Ekonomi mempunyai peran untuk memberikan prinsip yang logis bagi setiap bisnis sebagai suatu kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi yang dilaksanakan tidak hanya mengarah kepada kebutuhan hidup individu jangka pendek, tetapi juga mengarah kepada kesejahteraan banyak orang yang bisa memberikan nilai plus.<sup>21</sup>

Kegiatan ekonomi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang tidak terlepas dari pasar. Pada dasarnya kegiatan ekonomi lebih mengutamakan sebuah margin keuntungan bagi pelaku ekonomi dari pasar tersebut, sehingga sangat sulit untuk menemukan ekonomi yang dapat menyejahterakan, jika dilihat dari mekanisme pasar yang ada. Persaingan pasar yang mencari keuntungan, dapat dikatakan salah satu hal yang menjadi penghalang untuk menuju kesejahteraan. Persaingan dalam pasar adalah hal yang sangat wajar, karena persaingan menjadi hal yang wajib dalam mekanisme pasar. Dalam kegiatan pasar akan banyak pengaruh optimal atau tidaknya kegiatan ekonomi. Persaingan dalam pasar bisa mengakibatkan dampak yang tidak baik terhadap terwujudnya kesejahteraan ekonomi. Dimana persaingan pasar membuat

---

<sup>20</sup> Iskandar Putong, *Pengantar Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2019), hlm. 14

<sup>21</sup> Michael P. Todaro, dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2011), hlm. 14.

kondisi sosial yang harus diperhatikan dalam pencapaian ekonomi kesejahteraan menjadi lebih sulit tercapai.

Tingkat kesejahteraan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan dan penghasilan. Semakin tinggi tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Begitu pun sebaliknya, semakin kecil tingkat pendapatan maka semakin kecil pula tingkat kesejahteraannya. Hal yang utama dari tingkat kesejahteraan ekonomi yaitu daya beli, apabila daya beli menurun, maka bisa berpengaruh terhadap berkurangnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga bisa menyebabkan turunnya tingkat kesejahteraan.

Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana kebutuhan jasmani dan rohani keluarga dapat terpenuhi dengan tepat sesuai dengan derajat kehidupan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih spesifiknya sebagai berikut :

1. Kependudukan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Pendapatan
5. Konsumsi dan pengeluaran rumah tangga
6. Pekerjaan
7. Perumahan<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia, *Indikator Kesejahteraan Rakyat*, (Jakarta BPSI, 2020), hlm.34

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009, keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Keadaan kesejahteraan keluarga ditentukan oleh prinsip hidup masing-masing keluarga. Kondisi sejahtera bersifat tidak tetap, dapat berubah kapan saja baik dalam waktu cepat maupun lambat. Untuk memperoleh dan mempertahankan kesejahteraan, manusia harus berusaha secara terus-menerus dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan, sesuai dengan tuntutan hidup yang selalu berkembang tanpa ada batasan waktunya<sup>23</sup>.

Kesejahteraan dapat dikatakan sebagai suatu kondisi telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sesuai dengan standar kualitas hidup manusia. Kesejahteraan dibagi menjadi dua yaitu kesejahteraan lahir dan kesejahteraan batin. Kesejahteraan lahir umumnya diukur secara ekonomi misalnya terpenuhinya kebutuhan lahir manusia seperti kebutuhan akan makanan, kebutuhan akan pakaian, perumahan, dan lainnya. Kesejahteraan ini biasanya diinterpretasikan dari pendapatan. Sedangkan kesejahteraan batin diukur secara batiniah yaitu ketentraman, kedamaian, hubungan kekeluargaan, dan lain-lain. Kesejahteraan batin

---

<sup>23</sup> Andreas dan Enni Savitri, *Peranan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Meranti dan Rokan Hilir*, (Pekanbaru: Aldi Press, 2019), hlm. 32.

ini di interpretasikan dari relasi sosial atau kemanusiaan yang dapat menciptakan suasana damai dalam keberagaman sosial<sup>24</sup>.

Dalam agama Islam, kesejahteraan adalah tujuan ajaran agama Islam di bidang ekonomi. Hal tersebut adalah syarat mutlak untuk mendapatkan kesejahteraan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Indikator dari kesejahteraan keluarga adalah dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga, di mana kebutuhan itu dikategorikan menjadi 4 yaitu:

1. Kebutuhan jasmani, yaitu kebutuhan kebutuhan dalam bentuk alat, barang serta uang untuk menunjang kegiatan
2. Kebutuhan rohani adalah terpenuhinya kebutuhan keilmuan dalam agama dan pendidikan keluarga
3. Kebutuhan sosial psikologis adalah kebutuhan umat manusia sebagai hamba Allah Swt yang memiliki sifat sosial, perasaan seperti bahagia dan sedih
4. Kebutuhan kesehatan, yaitu kebutuhan akan kesehatan jasmani dan rohani<sup>25</sup>.

Ekonomi keluarga yang dapat menopang kehidupan keluarga, yaitu adanya keselarasan antara gaji dan konsumsi, penentuan skala kebutuhan, perluasan gaji keluarga dengan keadaan yang menjanjikan bagi wanita sebagai ibu rumah tangga

---

<sup>24</sup> Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, Lama Usaha, Dan Kewirausahaan Islami terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi*, (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm. 25.

<sup>25</sup> Asih Kuswardinah, *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*, (Semarang: UNNESPRESS, 2019), hlm. 2.

yang bekerja atau menjadi pebisnis. Terwujudnya kesejahteraan sebuah keluarga dapat dikatakan apabila terpenuhinya kebutuhan anggota keluarganya, baik kebutuhan untuk makanan, sandang, papan, sosial, kesehatan, pendidikan dan agama.

#### **E. Bentuk-Bentuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Menurut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tingkat kesejahteraan rumah tangga dikelompokkan kedalam kelompok yang disebut desil. Desil adalah kelompok persepuluhan yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pengelompokan Desil rumah tangga dalam DTKS sebagai berikut:

1. Desil 1 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 1-10% dan merupakan kelompok terendah tingkat kesejahteraannya (sangat miskin).
2. Desil 2 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 10%- 20% terendah (miskin).
3. Desil 3 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 20%- 30% terendah (hampir miskin).
4. Desil 4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kelompok 30%- 40% terendah (rentan miskin).
5. Desil >4 adalah rumah tangga yang masuk dalam kondisi mampu sangat mampu<sup>26</sup>.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Tingkat kesejahteraan keluarga dikelompokkan menjadi 5 indikator yaitu:

---

<sup>26</sup> BPS Propinsi, *Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tingkat kesejahteraan rumah tangga*, 2020.

1. Keluarga Pra Sejahtera Yaitu keluarga yang tidak memenuhi salah satu dari 6 indikator Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga"

a. Keluarga Sejahtera I

Keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau indikator kebutuhan psikologis.

Enam indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar keluarga yakni:

- 1) anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
- 2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian.
- 3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
- 4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan.
- 5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi.
- 6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

b. Keluarga Sejahtera II

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I dan delapan indikator keluarga sejahtera II. Tetapi tidak memenuhi

salah satu dari lima indikator keluarga III atau indikator kebutuhan pengembangan dari keluarga. Delapan indikator keluarga sejahtera II yakni:

- 1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
- 2) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 3) Luas lantai rumah paling kurang 8 m<sup>2</sup> untuk setiap penghuni rumah.
- 4) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing.
- 5) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
- 6) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin.
- 7) Pasangan usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

c. Keluarga Sejahtera III

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II, dan lima indikator keluarga

sejahtera III Tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III Plus atau indikator aktualisasi diri. lima indikator keluarga sejahtera III yaitu:

- 1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama.
- 2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
- 3) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
- 4) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

d. Keluarga Sejahtera III Plus

Keluarga yang mampu memenuhi keseluruhan dari keluarga I, II, dan III, serta dua indikator tambahan. Dua indikator tersebut yaitu:

- 1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial.
- 2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat<sup>27</sup>.

Salah satu yang menjadi indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat adalah pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh masyarakat yang

---

<sup>27</sup>Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). *Tingkat kesejahteraan keluarga*, (Jakarta : BKKBN, 2020), hlm.34



berasal dari pendapatan kepala rumah tangga maupun pendapatan anggota-anggota rumah tangga. Penghasilan tersebut biasanya dialokasikan untuk konsumsi, kesehatan, maupun pendidikan dan kebutuhan lain yang bersifat material.

Indikator pendapatan digolongkan menjadi 3 item yaitu:

1. Tinggi (Rp.>5.000.000)
2. Sedang (Rp. 1.000.000-Rp.5.000.000)
3. Rendah (< Rp.1.000.000)<sup>28</sup>

Keadaan kesejahteraan keluarga ditentukan oleh prinsip hidup masing-masing keluarga. Kondisi sejahtera bersifat tidak tetap, dapat berubah kapan saja baik dalam waktu cepat maupun lambat. Untuk memperoleh dan mempertahankan kesejahteraan, manusia harus berusaha secara terus-menerus dalam batas waktu yang tidak dapat ditentukan, sesuai dengan tuntutan hidup yang selalu berkembang tanpa ada batasan waktunya.

#### **F. Upaya Pemerintah Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat**

Pemerintah terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengurangan melalui perbaikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah menetapkan 3 jalur strategi pembangunan, yaitu :

1. Pro-Pertumbuhan (*pro growth*), untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui upaya menarik investasi, ekspor dan bisnis termasuk perbaikan iklim investasi.

---

<sup>28</sup> Ibid.

2. Pro-Lapangan Kerja (*pro-job*), untuk menciptakan lapangan kerja termasuk didalamnya menciptakan pasar tenaga kerja yang fleksibel dan menciptakan hubungan industri yang kondusif.
3. Pro-Masyarakat Miskin (*pro-poor*), untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat agar dapat berkontribusi terhadap pembangunan, memperluas akses terhadap layanan dasar, dan merevitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan, dan ekonomi pedesaan.<sup>29</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa menetapkan tiga jalur strategi pembangunan yaitu untuk meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk menciptakan lapangan, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas masyarakat.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat adalah usaha terencana dan melembaga yang meliputi berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial. Tujuan pengembangan kesejahteraan masyarakat adalah untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh yang mencakup

1. Peningkatan standar hidup, melalui seperangkat pelayanan sosial dan jaminan sosial segenap lapisan masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang sangat membutuhkan perlindungan sosial.
2. Peningkatan keberdayaan melalui penetapan sistem dan kelembagaan ekonomi, sosial, dan publik yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.

---

<sup>29</sup> Adi I.R. *Kesejahteraan sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial Dan Kajian Pembangunan)*: (Rajawali Pers, Jakarta 2015), hlm.37

3. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan yang tercermin pada semangat kesetiakawanan sosial, kepedulian sosial, kesadaran dan tanggungjawab sosial, serta disiplin sosial dalam masyarakat. Penyempurnaan kebebasan melalui perluasan aksesibilitas dan pilihan pilihan kesempatan sesuai dengan aspirasi, kemampuan dan standar kemanusiaan. pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan melalui usaha kesejahteraan sosial memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. Pencegahan, mencakup mencegah timbul, meluas serta kambuhnya permasalahan kesejahteraan sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat.
  - b. Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pematapan taraf kesejahteraan masyarakat untuk memungkinkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan masyarakat.
  - c. Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat
  - d. Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Irawan, Nata. *Tata Kelola UU Desa Era Pemerintahan Desa*: (Yayasan Pustaka Obor, Jakarta, Indonesia 2017), hlm.17

Sedangkan di bidang infra struktur pemerintah mencanangkan pembangunan bidang infrastruktur fisik :

1. Pembangunan infrastruktur jalan
2. Pembangunan infrastruktur fasilitas kesehatan
3. Pembangunan infrastruktur fasilitas pendidikan
4. Pembangunan infrastruktur fasilitas ekonomi (pasar, pajak)<sup>31</sup>

Dalam konteks desa membangun kewenangan lokal berskala Desa telah diatur melalui permendes PDTT No.1 tahun 2015 bahwa kriteria kewenangan lokal berskala desa meliputi:

1. Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
2. Kewenangan yang mempunyai lingkup pengaturan dan kegiatan hanya didalam wilayah dan masyarakat Desa yang mempunyai dampak internal desa
3. Kewenangan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan sehari-hari masyarakat desa
4. Program kegiatan pemerintah, pemerinyah provinsi, dan pemerintah kabupaten / kota dan pihak ketiga yang telah diserahkan da dikeloah oleh desa

---

<sup>31</sup> Kessa, Wahyudin. *Perencanaan pembangunan Desa Jakarta pusat. Kementrian Desa, pembangunan Daerah tertinggal*, (Jakarta : Pemdes, 2015), hlm.38

5. Kewenangan lokal berskala desa yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan tentang pembagian kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota<sup>32</sup>.

Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

#### **G. Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Dalam Tinjauan Syariat Islam**

Hakikat kesejahteraan masyarakat yaitu seseorang/kelompok yang hidupnya tidak ada rasa takut dan tidak pula bersedih. Rasa takut ialah kegoncangan hati menyangkut sesuatu yang negatif di masa akan datang, sedangkan bersedih ialah kegelisahan menyangkut sesuatu yang negatif yang pernah terjadi. Untuk mencapai hal tersebut, Allah telah memerintahkan beberapa hal dalam QS al-An'am 82:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ

Artinya : Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.*: (Erlangga, Jakarta 2012), hlm.127

<sup>33</sup> Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Depag RI, Jakarta, 2016), hlm.187

Al-A'raf 96 :

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَكِنَّ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

Artinya : Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat Kami), maka Kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan<sup>34</sup>.

An-Nur : 55

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن  
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْفَاسِقُونَ

Artinya : Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik<sup>35</sup>

Kata kunci kesejahteraan dari beberapa ayat di atas adalah iman, Menurut Quraish Shihab amal saleh adalah pekerjaan yang apabila dilakukan terhenti atau menjadi tiada (akibat pekerjaan tersebut) suatu mudharat (kerusakan) atau dengan dikerjakannya diperoleh manfaat dan kesesuaian<sup>36</sup>.

<sup>34</sup> Ibid, hm.261

<sup>35</sup> Ibid, hlm.319

<sup>36</sup> Shihab, M. Q. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian AlQur'an*. (Lentera Hati. Jakarta, 2012), hlm.326

Antara Iman dan amal saleh (perbuatan baik) dalam Al-Qur'an dijalin berpilin dengan eratnya, bagai tidak dapat atau tidak boleh diceraikan antara keduanya.berulangkali, apabila disebut *alladzina amanu* (orang-orang yang beriman) disambung dengan *wa'amilushshalihah* (dan mereka mengerjakan amal shaleh.)para ahli ilmu pernah memberikan perumpamaan amal saleh tanpa iman bagai pohon yang tiada mempunyai urat tunggang, sebaliknya iman yang tiada melahirkan amal soleh bagai pohon yang tiada berbuah.

Pada ayat di atas, Allah juga menganjurkan kepada manusia untuk memperhatikan generasi penerusnya (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mempersiapkan atau mendidik generasi penerusnya (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan moral dan material, sehingga kelak menjadi SDM yang terampil dan berakhlakul karimah, mengingat anak adalah asset yang termahal bagi orang tua dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi terutama bagi umat Islam.

Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa aspek-aspek yang sering dijadikan indikator kesejahteraan seperti tingkat pendapatan (besarnya kekayaan), kepadatan penduduk (jumlah anak), perumahan, dan lain-lain bisa menipu seseorang jika tidak diiringi dengan pembangunan mental atau moral yang berorientasi pada

nilai-nilai ketuhanan. yang pada gilirannya manusia dikhawatirkan akan terjebak pada persaingan kemewahan duniawi yang serba hedonis dan materialistik, dengan demikian penanaman tauhid (pembentukan moral dan mental) merupakan indikator utama bagi kesejahteraan.

Al-Qur'an telah menyinggung indikator kesejahteraan dalam Surat Quraisy ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ ۖ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ

Artinya :“Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah).Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut” berdasarkan ayat di atas, maka kita dapat melihat bahwa indicator kesejahteraan dalam Al-Qur’an tiga, yaitu menyembah Tuhan (pemilik) Ka’bah, menghilangkan lapar dan menghilangkan rasa takut.<sup>37</sup>

Berdasarkan beberapa ayat di atas maka dapat diketahui bahwa Indikator kesejahteraan ekonomi dalam Islam terdiri dari 3 indikator :

1. Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indicator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indicator kesejahteraan yang berpijak pada aspek materi telah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mengalami kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah, kendaraan banyak, harta yang melimpah namun hatinya selalu gelisah dan tidak pernah tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan materinya telah terpenuhi. Karena itulah ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam penghambaan (ibadah) kepada-Nya secara ikhlas merupakan indicator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki) seseorang sebagaimana yang dialami oleh penduduk Bhutan, Negara yang

---

<sup>37</sup> Departemen Agama RI, *Op-Cit*, hlm.376



- memiliki indeks kebahagiaan tertinggi dan merupakan negara paling aman di dunia.
2. Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), ayat di atas menyebutkan bahwa Dialah Allah yang memberi mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, statemen tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indicator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya (hanya untuk menghilangkan rasa lapar) dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi mengeruk kekayaan yang maksimal, terlebih lagi jika harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai anjuran Allah dalam surat Quraisy di atas, jika hal itu bisa dipenuhi, maka kita tidak akan menyaksikan adanya korupsi, penipuan, pemerasan, dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya.
  3. Indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman, dan damai. Jika berbagai macam kriminalitas seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lain banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan dan kedamaian dalam kehidupan, atau dengan kata lain masyarakat belum mendapatkan kesejahteraan<sup>38</sup>.

Sedangkan Imam Al-Ghazali memaknai kesejahteraan dengan menggunakan pendekatan maqashid. Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial yang tripartit meliputi: keniscayaan atau daruriyyat, kebutuhan atau hajiyyat, dan kelengkapan atau tahsiniyyat. Sehingga tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada pemenuhan daruriyyat yaitu: perlindungan agama (hifzudiin), jiwa (hifzunnafs), harta benda (hifzul maal), akal (hifzul-aqli), keturunan (hifzunnasl). Kata “melindungi” mengandung arti perlunya mendorong pengayaan perkara-perkara tersebut secara terus menerus sehingga keadaan semakin

---

<sup>38</sup>Ar-Razi, Muhammad Fakhruddin. *Tafsir Al-Fakhr ar-Razi asy-Syahir bi Tafisr al Kabir Wa Mafatih al Ghaib*, Vol. 9. Beirut: Dar el Fikr. 2019.

mendekat kepada kondisi ideal dan membantu umat manusia meningkatkan kesejahteraannya secara berkelanjutan<sup>39</sup>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan dapat diperoleh dengan membentuk mental menjadi mental yang hanya bergantung kepada Sang Khalik (bertaqwa kepada Allah Swt.), dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah Swt. Juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, baik kuat dalam hal ketaqwaannya kepada Allah Swt. Maupun kuat dalam hal ekonomi.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariat Islam, karenanya juga merupakan tujuan ekonomi Islam.

Perlindungan terhadap mashlahah terdiri dari 5 (lima) hal, yaitu :

1. Keimanan (*ad-dien*)
2. Ilmu (*al-ilm*)
3. Kehidupan (*an-nafs*)
4. Harta (*al-Maal*)
5. Kelangsungan keturunan (*an-nash*).<sup>40</sup>

Kelimitya merupakan sarana yang dibutuhkan bagi kelangsungan hidup yang baik dan mencapai tingkat kesejahteraan. Syariat Islam bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus menghindari mafsadat dan mudharat dari berbagai

---

<sup>39</sup> Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, Cet. 1, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 34

<sup>40</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Bandung, Kencana, 2011) hlm. 164

aspek kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Ada 5 (Lima) Masalah dasar sebagai bagian dari maqasid al Syari'ah yang harus dipelihara yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan mutlak harus terpenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak terpenuhi kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna untuk menuju kesejahteraan yang hakiki.

#### **H. Pembangunan Infrastruktur Dalam Konsep Ekonomi Islam**

Pembangunan infrastruktur dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Pembangunan infrastruktur ekonomi merupakan jenis pembangunan infrastruktur yang secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa pembangunan infrastruktur fisik, yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Pembangunan infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum, berupa tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Adapun pembangunan infrastruktur sosial adalah jenis pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan dan lain-lain. Baik infrastruktur ekonomi maupun infrastruktur sosial merupakan bagian yang penting untuk diwujudkan dalam satu daerah atau wilayah.

Tujuan kebijakan pembangunan dalam kerangka Konsep Pembangunan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya insani, yaitu menjadikan manusia sebagai objek utama dari kebijakan pembangunan Islam. Fokus utama dilakukan pada pengembangan pendidikan, orientasi spiritual dan pengembangan struktur hubungan yang berbasiskan kepada kerjasama, perkongsian dan penyertaan.
2. Pertambahan pengeluaran yang bermanfaat, dalam hal ini diutamakan pada pengeluaran yang mengutamakan keperluan dasar (dharuriyat).
3. Peningkatan kualitas kehidupan, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja, pengadaan sistem jaminan sosial, dan pemerataan pendapatan.
4. Pembangunan yang seimbang, yaitu pembangunan yang harmoni, tidak terjadi kepincangan pembangunan di berbagai sektor dan wilayah.
5. Pembangunan teknologi baru<sup>41</sup>.

Tujuan pembangunan ekonomi Islam seirama dengan tujuan pokok Islam, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia (falah).Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik dan kedamaian mental yaitu kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu<sup>42</sup>.

Maka pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian penting juga tidak luput dari perhatian. Jika suatu negara memiliki infrastruktur yang memadai dan tepat sasaran maka tujuan ekonomi akan mudah tercapai. Selain itu, aspek sosial juga terkena dampak sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan sisi sosial masyarakat suatu negara tersebut. Tentu tidak kalah pentingnya adalah bahwa pembangunan infrastruktur tersebut hendaknya untuk kepentingan seluruh elemen masyarakat, bukan atas dasar kepentingan-kepentingan individu tertentu.

---

<sup>41</sup> Joni Tamkin Borhan, *Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam*. Jurnal Ushuluddin. Vol. 27 2008 hal. 93.

<sup>42</sup> Rifyal Zuhdi, Annisa Qadarusman, *Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial*". Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. Vol 6 2020 hlm. 211

Dalam Islam adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqâshid syarîah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai falâh atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Bahwa kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik dalam skala kecil maupun besar. Sesuai dalam Al-Qur'an pada Surah Al-Mulk ayat 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ

Artinya: “Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”<sup>43</sup>.

Ayat ini mengandung makna bahwa secara umum, bagaimana kewajiban mengeluarkan biaya dan membangun fasilitas yang mendukung keberhasilan tersebut. Sudah sangat jelas bahwa dalam Islam pembangunan juga menjadi perhatian penting dalam memajukan peradaban. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan syariat atau undang-undang Islam yang ditujukan agar dapat membimbing manusia mencapai nilai kehidupan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Syariat Islam telah memastikan adanya kesesuaian di dalam kehidupan manusia, maka apabila peraturan Islam dilaksanakan berdasarkan panduan objektif-objektif syariah yang umum maupun khusus, maka pasti kestabilan dan keadilan sosial ekonomi akan tercapai.

Dalam sejarah Islam, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju Madinah. Hal yang pertama dilakukan adalah dengan membangun sebuah

---

<sup>43</sup> Depag RI, *Op-Cit*, hlm.375

masjid. Alasan Rasulullah terkait kebijakan tersebut adalah bahwa jika ingin membangun suatu peradaban yang berkemajuan, yang unggul dalam berbagai bidang baik agama, ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya. Maka infrastruktur menjadi faktor yang penting. Maka tidak ada lagi keraguan bahwa Islam juga sangat memperhatikan aspek pembangunan baik fisik dan non-fisik.

Hal ini menjadi perhatian, bahwa pembangunan fisik dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Secara tidak langsung, ketika sebuah negara memiliki aspek infrastruktur yang baik maka akan mempengaruhi alur distribusi ekonomi. Jika baik, maka distribusi akan lancar sehingga aspek ekonomi dan sosial akan terpenuhi dengan baik. Namun jika infrastruktur tidak baik, maka akan menyebabkan alur distribusi akan menjadi terhambat. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur menjadi aspek yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja.

Berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dalam Islam dapat dilihat dari sejarah nabi dan khalifah. Kelahiran Islam dengan Muhammad sebagai nabi, menghapuskan praktik hedonik di Makkah. Ka'bah lalu dibersihkan dari berhala-berhala sehingga memicu kemarahan masyarakat konservatif untuk hijrah ke Madinah.

1. Setelah hijrah ke Madinah, yang awalnya terbelakang dari sisi ekonomi kemudian menjadi kota yang makmur karena Muhammad menyatukan para suku yang sedang berkonflik. Maka dibangunlah masjid-masjid untuk ibadah dan pendidikan, Muhammad segera membangun sejumlah peraturan terkait masalah-masalah ekonomi, dalam hal ini perdagangan berdasarkan prinsip kebebasan, keadilan, kejujuran, dan anti-monopoli.

2. Abu Bakar pada hari pertama terpilih, langsung berencana untuk meninjau pasar. Pencapaiannya dibidang ekonomi, yaitu pendirian Baitul Maal, sebuah lembaga keuangan publik yang menjadi pengendali ekonomi makro lewat struktur fiskal.
3. Pada masa Umar, ia melanjutkan pembangunan Baitul Mal dengan melakukan sistematisasi proses fiskal. Dilakukan dengan cara mengelola sumber dan pengeluaran pendapatan. Tidak hanya bersumber dari zakat, sedekah, ghanimah, dan jizyah tetapi bea cukai, pajak pertambangan, pajak perdagangan.
4. Pada masa usman, uang tembaga diperkenalkan sebagai pecahan dari uang dirham . Perilaku Ustman mirip dengan Umar dalam segi kesederhanaan. Banyak uangnya digunakan untuk membebaskan para budak. Selain itu, dalam hal pembangunan. Ustman melakukan perluasan pada Masjidil Haram meskipun telah dilakukan pada masa pemerintahan Umar.
5. Pada masa Ali tidak ada pembangunan ekonomi secara besar-besaran karena meneruskan kebijakan-kebijakan umum dari pemerintahan sebelumnya. Sumber utama Ali dalam bidang ekonomi datang dari suratnya yang mana terdapat pada Al-ashtar dalam Nahjul Balagha. Sejumlah prinsip yang berhasil disarikan yaitu salah satunya adalah sumber daya publik tidak digunakan untuk tujuan pribadi<sup>44</sup>.

Saat Rasulullah hijrah ke Madinah, dengan segala kesulitannya ketika itu. Ada kebijakan strategis yang diambil. Model pengembangan ekonomi dari periode paling awal Islam telah diselidiki dari empat dimensi:

1. Motif yang disediakan adalah untuk kegiatan ekonomi;
2. Terdapat lembaga yang memfasilitasi pertukaran;
3. Aturan perilaku yang ditentukan untuk tujuan membimbing kegiatan ekonomi sementara membatasi distorsi dan konflik kepentingan dalam kegiatan ini juga tindakan yang menyebabkan kerugian bagi publik; dan
4. Kebijakan yang diterapkan untuk mencapai tujuan Islam dan nilai keadilan<sup>45</sup>.

Infrastruktur dapat dibedakan dalam dua jenis, yakni infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi merupakan jenis infrastruktur yang

---

<sup>44</sup> Beik, Irfan Syauqi dan Arsyianti, Laily Dwi, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta:RajaGrafindo Persada.2015), hlm.23

<sup>45</sup> Nurul Huda , dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.12

secara langsung mendorong kegiatan ekonomi masyarakat berupa infrastruktur fisik, yang digunakan dalam proses produksi dan distribusi serta yang dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas. Infrastruktur ekonomi meliputi semua prasarana umum seperti jalan, tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih, dan sanitasi, serta pembuangan limbah. Adapun infrastruktur sosial adalah jenis infrastruktur yang mendukung kesejahteraan sosial, meliputi prasarana kesehatan dan pendidikan dan lain-lain.